



Corporate Political Engagement Index Menera Politik di Balik Pembangkit Batu Bara

J. Danang Widoyoko

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia

Bisnis dan politik

- Karena polusi, batu bara mulai ditinggalkan oleh negara maju yang beralih ke energi bersih.
- Indonesia justru banyak membangun pembangkit batu bara.
- Selain karena ekosistem energi bersih yang belum ada, terdapat factor politik yang tidak bias diabaikan.
- Banyak kebijakan public dibuat berdasarkan pertimbangan politik dan kepentingan ekonomi politik elit daripada kalkulasi teknis dan rasional.
- CPEI hendak mengukur pengaturan relasi dan interaksi antara bisnis dan politik, secara khusus perusahaan dan pengambil kebijakan.
- PLTU perlu diatur karena pembeli listrik adalah PLN dan akhirnya dibebankan ke konsumen serta ada subsidi pemerintah.



Politically Exposed Person

- Keterkaitan antara politik dan bisnis sangat dekat di Indonesia.
- Perusahaan milik negara dan swasta menempatkan PEP ke dalam struktur perusahaan, terutama di Dewan Komisaris.
- Sebagian dari komisaris tidak memiliki skill, pengetahuan dan keterampilan di bisnis, tetapi diangkat karena akses ke pengambil kebijakan.
- Selain akses ke pengambil kebijakan, komisaris BUMN diberikan untuk pendukung Presiden.



Data

- Meskipun PLN adalah BUMN yang dimiliki negara 100%, tetapi informasi yang tersedia terbatas.
- Minim informasi PLTU yang bisa diakses publik
- Tidak semua IPP terdaftar di AHU-Kemenkumham.
- CPEI mengandalkan data-data sekunder dan akses di AHU.
- PLTU: modal internasional + modal domestik
- Modal domestik : BUMN (anak-cucu + BUMD), oligarki, swasta domestik.



Temuan umum

- Skor CPEI rendah. Temuan ini mengindikasikan, soal keterlibatan politik perusahaan PLTU tidak (sedikit) diatur.
- Transparansi rendah (PLN tertutup, perusahaan tidak responsif)
- Keberadaan PEP, 40 dari 90 PLTU, dan minimnya aturan membuat praktik “revolving door”, lobby oleh perusahaan, dan regulatory capture mudah dilakukan dan terbuka untuk mempengaruhi kebijakan publik.
- Minim informasi BO, membuka peluang korupsi dalam tender.

Agenda selanjutnya

- Membuka seluruh informasi perusahaan PLTU dan seluruh pembangkit PLN.
- Mendorong pengaturan konflik kepentingan, khususnya revolving door, rangkap jabatan birokrasi.
- Pengaturan pendanaan politik tidak cukup diatur dalam regulasi Pemilu, tetapi perusahaan swasta juga didorong mengatur secara internal.